

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Suci:

Al-Quran dan Terjemahannya

Buku:

- Abdulkadir Muhammad. 2001. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi. 2014. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Cetakan Keenam. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aartje Tehupeiory. 2012. *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Angger Sigit Pramukti dan Erdha Widayanto. 2015. *Awas Jangan Beli Tanah Sengketa*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Fakfak. 2023. *Kabupaten Fakfak Dalam Angka 2023*. Fakfak: BPS Kabupaten Fakfak.
- _____. 2023. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Fakfak Menurut Lapangan Usaha 2018-2022*. Fakfak: BPS Kabupaten Fakfak.
- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. 2016. *Strategi Sanitasi Kabupaten Fakfak Tahun 2016*. Fakfak: Bappeda Kabupaten Fakfak
- Boedi Harsono. 2008. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta : Djambatan.
- _____. 2007. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentuk Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Chandra, S. 2005. *Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Grasindo.
- C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hans Kelsen. 1971., *General Theory of Law and State*. Cetakan VII. Bandung: Nusa Media.
- Hasim Purba. 2019. *Dasar-Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Herman Hermit. 2004. *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara Dan Tanah Pemda, Teori dan Praktek Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- H.M. Arba. 2018. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Imamulhadi. 2017. *Ikhtisar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: K-Media.
- Ishaq. 2016. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J Andy Hartanto. 2014. *Hukum Pertanahan Karakteristik Jual Beli Tanah yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanah*. Surabaya: Laksbang Justitia.
- Khairuddin Ahmad. 2009. *PPAT Sebagai Pejabat Khusus di Bidang Pertanahan*, Jakarta: Media Ilmu.
- Khotibul Umam dkk. 2015. *Filsafat Hukum dan Etika Profesi*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Mahendra, A.A. 2001. *Tugas dan Wewenang Jabatan PPAT Sementara*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Nandang Alamsyah. 2015. *Administrasi Pertanahan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- _____. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Purwaningsih, E. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Ridwan H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Samsaimun. 2018. *Peraturan Jabatan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Dalam Peralihan Hak Atas Tanah di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Santoso, U. 2016. *Pejabat Pembuat Akta Tanah: Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*, Jakarta: Kencana.
- _____. 2007. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Cetakan ke-V. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, I.K.O. 2020. *Hukum Agraria*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

- Sihombing, I.E. 2005. *Segi-segi Hukum Tanah Nasional dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Soekanto, S. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Yapiter Marpi. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce*, Tasikmalaya: Zona Media Mandiri.

Jurnal:

- Ardisetyaning Cintia Primipara. *Urgensi Keberadaan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara Dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah (Studi di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)*. Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2016. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1971>
- Baharuddin. *Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Proses Jual Beli Tanah*. Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 5 No 1, Maret 2014.
- Christiana Sri Murni. *Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Proses Peralihan Jual Beli Hak atas Tanah*. Jurnal Kajian Pembaharuan Hukum. 2021. DOI: <https://doi.org/10.19184/jkph.v1i1.23384>.
- Dian Ekawati, dkk. *Prosedur Peralihan Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indoneisa, Jamaika*: Jurnal Abdi Masyarakat Vol. 2 No. 1.
- Iga Gangga Santi Dewi. *Peran Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Jual Beli Tanah*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Vol. 5 No. 3, 2010.
- Made Putri Saraswati, dkk. *Kedudukan Hukum Akta PPAT Setelah Terbitnya Sertifikat Karena Peralihan Hak Atas Tanah*. Jurnal Acta Comitas 1 : 26-40, 2018.
- Nurhayati dan Linus, E. *Kajian Hukum Terhadap Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Yuriska Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5 No.1, 2013.

- Rizki Fitria Sari dan Nabitatus Sa'adah. *Penunjukan Camat Sebagai PPAT Sementara Di Wilayah Kerja yang Formasi PPAT Telah Terpenuhi*. Jurnal Notarius Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Vol. 15 No. 1, 2022.
- Rizky Aulia. *Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dibawah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN*. Jurnal Ilmiah Universitas Lampung, 2017.
- Siti Melisa Harahap. *Analisis Yuridis Atas Peralihan Hak Atas Tanah Yang Tidak Dilakukan Dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) (Studi Pada Perumahan Bumi Beragam Baru Di Kota Binjai)*. Jurnal Perspektif Hukum, Vol 2 No. 1, Februari 2021.
- Teresia Din, dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Otentik*, Jurnal Penelitian Hukum Legalitas Universitas Jayabaya Vol. 10 No. 2, 2017.

Skripsi/Tesis/Disertasi:

- Andi Megah Hutami Adiningsih. *Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Dengan Objek Jual Beli Tanah Sengketa*. Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin, 2019.
- Dedi Supriatno. *Praktek Pembuatan Akta Tanah Oleh Camat Dalam Kedudukan Dan Fungsinya Selaku PPAT Sementara Di Kecamatan Sungai Raya Kalimantan Barat*. Tesis, Universitas Diponegoro, 2010.
- Didik Ariyanto. *Pelaksanaan Fungsi Dan Kedudukan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Di Kabupaten Grobogan*. Tesis, PPS Universitas Diponegoro, 2006.
- Eka Febriyana. *Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Terhadap Pembuatan Akta Jual Beli Yang Tidak Transparan Dan Akuntabel Di Kabupaten Sleman*. Tesis, Program Studi Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Irawan Soerodjo. *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah di Indonesia*. Disertasi, Program Pasca Sarjana Unair, Surabaya, 1999.

- Siti Fatimah. *Tinjauan Yuridis Pengangkatan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara (Studi di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali)*. Tesis, Pasca Sarjana Program Studi Kenotariatan UNS Solo, 2016.
- Urai Irfan. *Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat*. Skripsim Badan Pertanahan Nasional Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, 2015.
- Yuridiska Rananda Westri. *Eksistensi Camat Sebagai Akta Tanah (PPAT) Sementara Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul*. Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan UGM Yogyakarta. 2015.

Peraturan Perundang-undangan:

- Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996* tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996* tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997* tentang Pendaftaran Tanah.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998* tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016* tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT.
- Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015* tentang Badan Pertanahan Nasional.
- Indonesia, *Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997* tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Indonesia, *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.*

Indonesia, *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.*

Artikel/Berita Internet:

Putri Ayu Trisnawati. *Jenis – Jenis Peralihan Hak Atas Tanah.* Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan. <https://pdb-lawfirm.id/jenis-jenis-peralihan-hak-atas-tanah/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-bagi-ppat-yang-membuat-akta-tak-sesuai-data-lt4fe7c8b0c2b9d>

<https://www.harianproperty.com/Strategi/details/538/Apa-Itu-Peralihan-Hak-Atas-Tanah>

<https://pytagoals.com/pendaftaran-ujian-pejabat-pembuat-akta-tanah-tahap-ii-tahun-2019.html>

Sumber Lain:

Kamus Besar Bahasa Indonesia (daring). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. Diakses pada 1 Mei 2023

Wawancara dengan PPAT di Kabupaten Fakfak, Bpk Yoseph Irianto Widiabrata, SH pada tanggal 22 Februari jam 15.30 WIT.

Wawancara dengan Bpk Ashar, SH, Plt Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, BPN Kabupaten Fakfak pada tanggal 28 februari pukul 15.30 WIT.